

**TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK
DI BPR BKK Capem BATURETNO Kab. WONOGIRI**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Jurusan Ilmu Hukum**

Oleh :

I Putu Rahadhian Sukma

NIM : C 100.050.215

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, bangsa Indonesia telah melakukan pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut diperlukan usaha untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan antar bidang.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Usaha yang telah dilakukan pemerintah tersebut salah satunya adalah dengan meningkatkan dan menyempurnakan dalam bidang hukum dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum nasional. Usaha pemerintah tersebut bertujuan untuk memajukan pembangunan yang telah dicapai agar lebih mantap dan mengarah pada sasarannya sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum demi terwujudnya keadilan di Indonesia.

Sebagai langkah utama pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia, salah satunya adalah dengan memberikan pinjaman melalui jalur perkreditan bagi masyarakat yang membutuhkan tambahan modal dengan tujuan mengembangkan dan meningkatkan usahanya. Mengingat

kebutuhan manusia yang beraneka ragam, tidak terbatas dan akan terus bertambah baik macam, jumlah maupun mutunya. Hal ini dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, dan tingkat kebudayaan manusia yang semakin meningkat.

Terhadap kebutuhan manusia yang dinamis, sedangkan sarana untuk memenuhi kebutuhan terbatas, akibatnya pendapatan yang diperoleh relatif terbatas pula. Salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil seperti guru, TNI, dan pegawai instansi pemerintah lainnya. Di negara kita gaji pegawai negeri masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terutama di era krisis seperti sekarang ini. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan hidup pegawai negeri adalah dengan cara mengajukan pinjaman kepada bank yang kemudian dikenal dengan istilah perjanjian kredit bank. Adapun yang diartikan dengan “Bank” adalah :

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Ketentuan mengenai perjanjian kredit bank diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Didalam pelaksanaan pemberian kredit kepada debitur, diperlukan suatu keyakinan dari pihak kreditur bahwa kredit yang telah diserahkan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Maka sebelum memberikan kredit, kreditur harus melakukan penelitian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Penelitian yang dilakukan oleh bank ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.

Bank sebagai lembaga keuangan banyak diminati oleh masyarakat untuk mengajukan kredit. Mayoritas kegiatan perekonomian di Indonesia menggunakan fasilitas kredit, terutama dunia usaha karena hampir semua dunia usaha membutuhkan kredit untuk menambah modal dan untuk memperluas usahanya serta meningkatkan produktifitas mereka. Pemberian kredit merupakan tulang punggung kegiatan perbankan, dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, pendapatan atau keuntungan bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit. Maka dari itu pemberian kredit akan terus menerus dilakukan oleh bank demi kesinambungan operasionalnya. Hal ini akan didapati pada neraca bank bahwa pada sisi pendapatan bank akan terlihat pendapatan terbesar bank bersumber dari pendapatan bunga dan kredit, sedangkan pada sisi aktiva bank akan didominasi oleh besarnya kredit. Dari sini nampak bahwa kegiatan perkreditan baik itu berkaitan secara langsung maupun tidak langsung merupakan aktivitas terbanyak yang dilakukan oleh bank.

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu diantaranya :

- 1 Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
- 2 Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan memberikan kerugian;
- 3 Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham, dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham;
- 4 Bank tidak diperkenankan memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit (legal lending limit).¹

Di dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa:

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang diperjanjikan”

Dari penjelasan pasal tersebut tersirat bahwa jaminan merupakan salah satu faktor dan syarat dalam pertimbangan pemberian kredit.

Jaminan atau agunan hanya merupakan salah satu aspek saja, tidak ada kata-kata yang secara tegas menyebutkan keharusan adanya jaminan. Namun demikian, dalam praktik peran jaminan sangat menentukan, sebab tanpa jaminan

¹ Djumhana Muhammad, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.392.

bank tidak berani menanggung risiko tinggi untuk kehilangan dana yang telah disalurkanannya. Fungsi dari jaminan antara lain:

- 1 Untuk menyakinkan bank dalam mengeluarkan kredit,
- 2 Menjamin agar debitur berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya,
- 3 Memberikan hak dan kewajiban pada bank untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan apabila debitur melakukan cidera janji,
- 4 Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian kredit.

Dengan adanya jaminan dimaksudkan agar bank merasa aman dalam memberikan kredit kepada debitur. Adapun jaminan kredit ini berupa gedung, dapat juga surat-surat berharga yang nilai dan kegunaannya masih terjamin. Pada Bank Perkreditan Rakyat BKK Capem Baturetno Kab. Wonogiri dalam memberikan layanan kreditnya dapat menggunakan jaminan berupa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.

Jaminan berupa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil ini merupakan bentuk kebijaksanaan yang longgar yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam usahanya memberikan pelayanan kredit dalam bentuk sederhana dengan syarat yang tidak memberatkan, prosedur yang tidak sulit serta jaminan yang ringan yang tentunya tidak akan memberatkan pegawai negeri sipil dalam usahanya memperoleh kredit dengan mudah dan cepat untuk membangun dan memperluas usahanya. Kebijakan yang longgar dalam perkreditan ini dimaksudkan untuk meningkatkan taraf perekonomian golongan ekonomi lemah

seperti pegawai negeri sipil yang taraf hidupnya masih pas-pasan untuk mengembangkan usahanya, namun jaminan kredit yang dapat diberikannya kurang memadai. Dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil ini debitur tidak perlu membayar angsuran karena secara otomatis gaji akan terpotong untuk angsuran setiap bulannya, yakni dengan dikeluarkannya surat kuasa pemotongan gaji oleh bendahara. Hal ini tentu memberikan kemudahan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam memberikan kredit dari bank.

Dalam perjanjian kredit, para pihak baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur sama-sama menghendaki adanya kepastian hukum dalam membuat perjanjian, agar diantara kedua belah pihak baik itu pihak debitur maupun pihak kreditur tidak ada yang diragukan. Maka dibuatlah perjanjian kredit itu secara tertulis oleh para pihak, dan sebagai sumbernya adalah pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

KUH Perdata kita khususnya yang mengatur mengenai hukum perjanjian menganut sistem terbuka atau open system. Artinya, hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Kemudian hal ini lebih dikenal dengan istilah Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Menurut ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur tentang bentuk dari perjanjian kredit bank, namun pasal 1 butir 11 menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bank dengan pihak lainnya....”

Dari ketentuan-ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa bentuk dari perjanjian kredit bank diserahkan pada yakni pihak kreditur (bank) dan pihak debitur untuk membuatnya. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah, yaitu:

- 1 Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana.
- 2 Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debiturnya berdasarkan hubungan kontraktual atau perjanjian disebut juga dengan perjanjian kredit bank. Walaupun unsur kepercayaan lebih mendominasi pada waktu pemberian kredit, seolah-olah hubungan hukum antara bank dengan nasabah itu hanya berdasarkan kepercayaan. Namun, dalam praktek pemberian kredit, bank tetap mengikat calon nasabahnya dengan perjanjian kredit. Sehingga dapat dikatakan lain, unsur kepercayaan hukum juga mendasari terjadinya hubungan antara bank dengan nasabah. Adapun konsekuensi dari keadaan ini adalah apabila nasabah debitur mengalami kredit macet dan selama unsur pidana tidak ditemukan didalamnya, maka debitur hanya dapat dikatakan wanprestasi dan bukan perbuatan melawan

hukum. Jadi, hubungan hukum bank dengan nasabah debitur, bukan hanya hubungan antara kreditur dan debitur berdasarkan kepercayaan dan kontrak saja, tetapi juga sebagai hubungan kerahasiaan, dan hubungan kehati-hatian.

BPR sebagai pihak kreditur mengeluarkan surat perjanjian kredit yang akan ditandatangani oleh debitur. Di dalam praktik, setiap bank telah menyediakan blanko (formulir, model) perjanjian kredit, yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu (standard form). Formulir ini akan disodorkan pada setiap pemohon dan isinya tidak diperbincangkan dengan pemohon.

Berdasarkan uraian atas permasalahan pada latar belakang di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan suatu pengetahuan akan suatu hal yang patut diangkat menjadi sebuah penelitian dengan judul ” TINJAUAN PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DI BPR BKK Capem BATURETNO KABUPATEN WONOGIRI ”.

B. Pembatasan Masalah

Agar dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari sasaran yang hendak dicapai dan mendapatkan hasil yang optimal, maka dengan mengingat kemampuan dan pengetahuan yang ada perlu kiranya penulis membuat pembatasan masalah yang sesuai dengan judul skripsi ini yaitu mengenai tinjauan pelaksanaan perjanjian kredit bank.

Untuk itu penulis memberi batasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu meliputi:

- 1 Pembatasan wilayah penelitian

Karena terbatasnya jangkauan penulis, maka wilayah hanya terbatas pada BPR. BKK Capem Baturetno Kab. Wonogiri.

- 2 Pembatasan obyek penelitian

Obyek penelitian, penulis batasi hanya mengenai pelaksanaan perjanjian kredit bank khususnya dengan menggunakan jaminan surat keputusan pegawai negeri sipil.

C. Perumusan Masalah

Kesepakatan dari kedua belah pihak ditandai dengan adanya prestasi dari pihak kreditur dan kontraprestasi dari pihak debitur, dan untuk memperoleh kepastian untuk pengembalian atau pelunasan kredit, bank sebagai pihak kreditur mengeluarkan surat perjanjian yang akan ditandatangani oleh pihak debitur.

Dalam usaha menghindari kemungkinan perluasan masalah dan agar pembahasan dalam penulisan hukum lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang ditentukan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimanakah prosedur permohonan kredit di BPR. Bank Kredit Kecamatan Cabang Pembantu Baturetno Kab. Wonogiri dengan SK Pegawai Negeri Sipil?
- 2 Apakah yang menjadi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak?
- 3 Permasalahan apa sajakah yang timbul dan bagaimana cara menyelesaikannya?

D. Tujuan Penelitian

Penyusunan penulisan hukum ini mempunyai tujuan agar nantinya penelitian ini lebih terarah dan mengenai sasaran. Adapun tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui prosedur permohonan kredit di BPR. BKK Capem Baturetno Kab. Wonogiri dengan SK PNS.
- b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak di dalam perjanjian kredit bank tersebut.
- c. Untuk mengetahui permasalahan yang ada serta cara menyelesaikannya sehubungan dengan perjanjian kredit bank tersebut.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang perjanjian kredit bank dengan teori yang penulis peroleh selama berada di bangku kuliah.
- b. Untuk memperoleh data yang lengkap guna penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat akademis guna mencapai jenjang kesarjanaan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya hukum perdata.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat digunakan oleh almamater sebagai bahan perkuliahan.
- c. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam bidang perbankan khususnya dalam hal perkreditan dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Untuk mempraktikkan teori penelitian hukum yang penulis peroleh selama menempuh kuliah.
- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang seluk beluk perjanjian kredit bank dengan jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis serta sistematis. Masalah metode adalah masalah yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah karena nilai, mutu, dan hasil suatu penelitian ilmiah sebagian besar ditentukan oleh ketetapan dalam memilih metodenya.

Adapun metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya”.²

Di samping itu, penulis juga menggunakan metode penelitian normatif sosiologis, yaitu metode yang mengungkapkan aturan-aturan secara normatif yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan kemudian dicocokkan dengan kenyataan di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Bank Perkreditan Rakyat BKK Capem Baturetno Kab. Wono giri.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis-jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara di Bank Perkreditan Rakyat BKK Capem Baturetno Kab. Wonogiri, yaitu keterangan yang diberikan oleh kepala bagian kredit dan keterangan dari debitur.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 1981, hal. 10.

- 2) Data sekunder, yaitu data yang terlebih dahulu sudah dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain diluar peneliti yang berupa dokumen, laporan-laporan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, antara lain berupa surat perjanjian kredit antara pihak bank dengan pihak nasabah.

b. Sumber data

- 1) Sumber data primer, adalah data yang diperoleh dari lokasi penelitian, antara lain dari Kepala Bagian Kredit BPR.BKK Capem Baturetno Kab. Wonogiri dan dari debitur kurang lebih sebanyak dua orang.
- 2) Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, berupa buku-buku, artikel-artikel, dan peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan suatu penelitian dimana peneliti secara langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan data dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui studi lapangan adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan

mengajukan pertanyaan kepada responden secara lisan. Ada dua jenis wawancara, yaitu:

- 1) Wawancara berpatokan, merupakan wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (*questionnaire*).
- 2) Wawancara tidak berpatokan merupakan wawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan.

Adapun teknik wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara berpatokan agar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Dengan cara ini penulis membuat draft terlebih dahulu sehingga pertanyaan yang diajukan dapat terarah sesuai dengan disiplin ilmu yang dipakai. Hal ini disebabkan oleh luasnya ruang lingkup dalam hal perbankan yang mencakup berbagai disiplin ilmu.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan yang berupa buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, makalah, dan bahan kepustakaan lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti agar mendapatkan gambaran dan pengertian secara teoritis.

5. Teknik Analisis Data

“Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian

dasar”.³ Data yang sudah diperoleh dikumpulkan dalam aneka macam cara dan diproses sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih bahasa). Mengingat data yang telah diperoleh dari penelitian ini adalah bersifat kualitatif (beraneka ragam dan tidak bisa dikualifikasikan) maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif yang didukung dengan teknik triangulasi data.

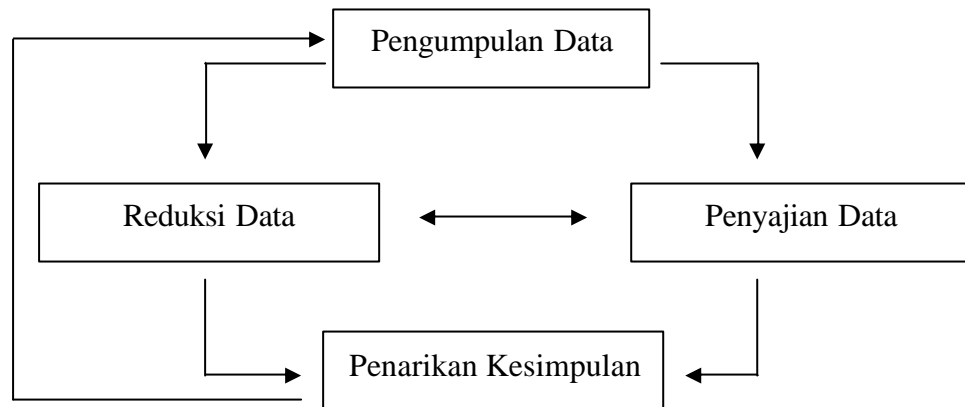
Dalam proses analisis data terdapat tiga komponen yang harus benar-benar dipahami oleh peneliti. Menurut H.B. Sutopo ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Reduksi data, merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi dari data fieldnote. Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai.
- b. Sajian data, adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan research dapat dilakukan, sajian data dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola pertanyaan.

Setelah data terkumpul, maka ketiga komponen tersebut berinteraksi dan apabila kesimpulan dirasa kurang kuat maka dilakukan verifikasi dan

³ Lexy J Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989, hal 112

peneliti kembali dengan pengumpulan data di lapangan. Apabila hal tersebut digambarkan dalam diagram adalah sebagai berikut:



G. Sistematika Skripsi

Sistematika ini memuat uraian tentang isi bab-bab yang merupakan bahan utama dalam skripsi ini secara garis besar guna menghantarkan pembaca pada inti isi setiap bab maupun bagian-bagian yang lebih kecil dalam suatu bab. Dengan demikian dapat diketahui kaitan-kaitan yang ada dalam pembahasan yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Perjanjian

- a. Pengertian perjanjian
- b. Syarat-syarat sahnya perjanjian
- c. Unsur-unsur Perjanjian
- d. Asas-asas hukum perjanjian
- e. Akibat hukum perjanjian yang sah
- f. Prestasi, wanprestasi dan akibatnya
- g. Overmacth

2. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

- a. Pengertian kredit
- b. Pengertian perjanjian kredit
- c. Jaminan dan agunan kredit
- d. Penggolongan lembaga jaminan

3. Tinjauan Umum Bank

- a. Pengertian bank
- b. Kegiatan-kegiatan Perbankan menurut UU No. 10 Tahun 1998
- c. Macam-macam bank
- d. Kewajiban dan tanggung jawab banker
- e. Asas, fungsi dan tujuan

4. SK Pegawai Negeri Sipil

B. Kerangka Pemikiran

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Tempat Penelitian

1. Sejarah berdirinya bank perkreditan rakyat Capem Baturetno Kabupaten Wonogiri
2. Struktur organisasi bank perkreditan rakyat Capem Baturetno
3. Jasa-jasa yang diberikan bank perkreditan rakyat Capem Baturetno
4. Jenis Kredit yang diberikan oleh bank perkreditan rakyat Capem Baturetno

B. Prosedur Permohonan Kredit Bank dengan Jaminan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil di BPR BKK Capem Baturetno Kabupaten Wonogiri

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Pembuat Perjanjian

1. Hak dan kewajiban pihak bank perkreditan rakyat cabang pembantu Baturetno
2. Hak dan kewajiban nasabah

D. Permasalahan yang Timbul dan Cara Mengatasinya

1. Debitur diberhentikan dari instansi tempat kerja
2. Debitur meninggal dunia
3. Tindakan bendahara yang nakal
4. Debitur dipindahtugaskan
5. Debitur pensiun

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN